

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan berasal dari kata “ miskin” yang secara etimologis didefinisikan sebagai kondisi tidak berharta barang serta serba kekurangan. Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum agar hidup layak (BPS dan Depsos, 2002). Disebutkan lebih lanjut bahwa kemiskinan adalah suatu keadaan yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk memenuhi kebutuhan makanan dan non makanan yang disebut dengan garis kemiskinan (*poverty line*) ataupun batas kemiskinan (*poverty threshold*).

Suryawati (2005: 122) berpendapat bahwa kemiskinan merupakan kondisi adanya suatu ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan primer, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum dan kondisi ini dihubungkan dengan kualitas hidup. Kemiskinan juga berarti tidak terdapatnya akses terhadap pendidikan serta pekerjaan yang layak untuk dapat mengatasi permasalahan kemiskinan serta memperoleh kehormatan yang layak sebagai masyarakat.

Frank Ellis dalam Suharto, (2005: 6), berpendapat bahwa kemiskinan dapat diklasifikasikan kedalam berbagai dimensi aspek , yaitu aspek ekonomi, sosial-psikologis dan politik. Apabila dilihat dari aspek ekonomi, kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan kurangnya sumberdaya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk memperoleh suatu kesejahteraan sekelompok orang. Sumberdaya yang

dimaksud tidak hanya tentang permasalahan finansial dari individu tersebut, akan tetapi juga menyangkut semua aspek kekayaan (*wealth*) yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam definisi yang lebih luas.

Dari definisi konsep kemiskinan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kemiskinan dapat diukur secara langsung yaitu dengan melihat ketidakmampuan individu ataupun kelompok dalam memenuhi kebutuhan hidup primer yang disebut hidup dibawah garis kemiskinan (*poverty line*). Hingga saat ini, kemiskinan masih menjadi permasalahan yang sangat sulit untuk diatasi oleh banyak negara di dunia terutama di negara berkembang seperti Indonesia.

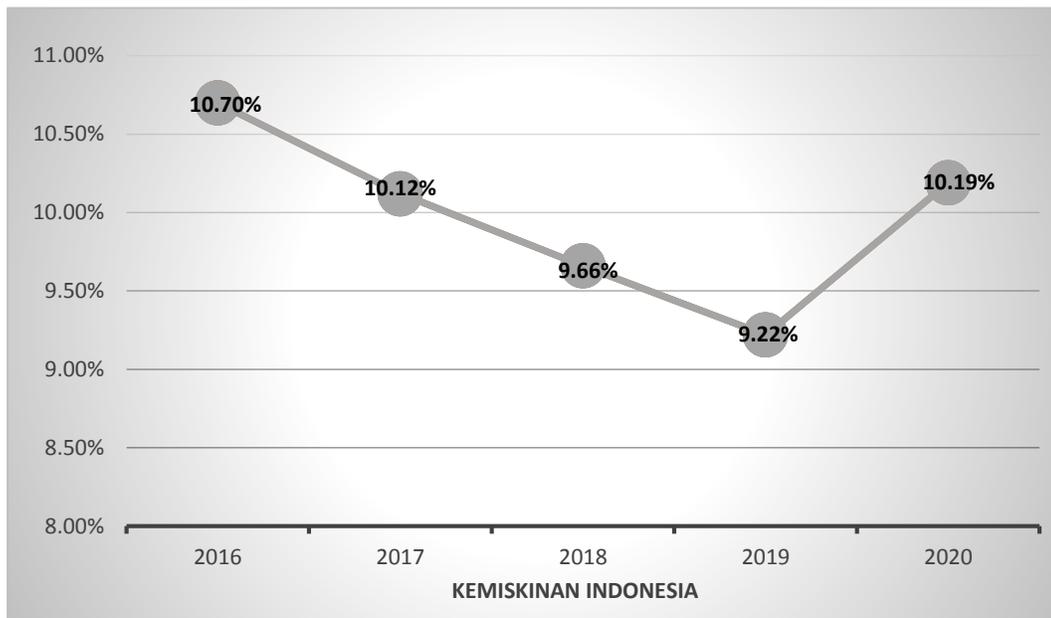
Menurut data *Asian Development Bank* (2019):

- Pada Tahun 2017, diperkirakan sebanyak 25 meninggal dunia sebelum memasuki usia 5 tahun dari setiap kelahiran 1.000 bayi di Indonesia
- Pada tahun 2018, kuantitas populasi masyarakat Indonesia yang hidup di bawah paritas daya beli harian \$1.9 mengalami penurunan dari sebelumnya 10,4% di 2017 menjadi 5,7% pada tahun 2018
- Pada tahun 2018, diketahui warga negara yang hidup dibawah garis kemiskinan sebanyak 9,8% dari total populasi di Indonesia

Dari informasi diatas dapat disimpulkan bahwa permasalahan kemiskinan di Indonesia masih sangat sulit untuk diatasi. Disamping memerlukan usaha dari semua el-

emen negara, baik itu pemerintah, swasta, dan masyarakat supaya dapat mengatasi permasalahan kemiskinan ini. Lebih lanjut terkait dengan masalah kemiskinan di Indonesia akan dijelaskan pada grafik 1.1 berikut :

Grafik 1.1 Statistik Kemiskinan di Indonesia

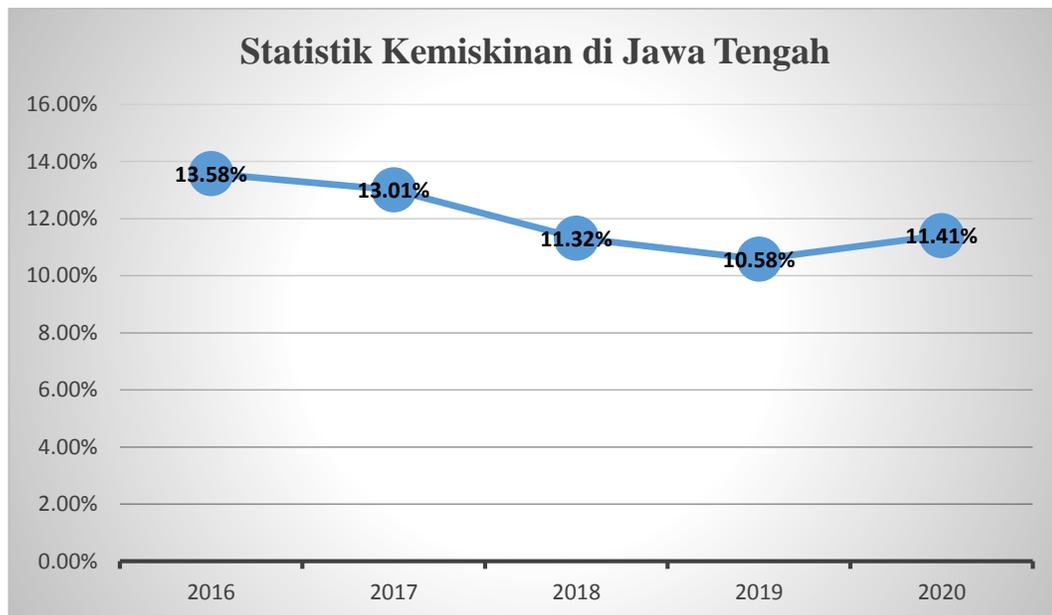


Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional, 2020

Kemiskinan Indonesia menunjukkan perubahan dengan angka kemiskinan tahun 2016 mencapai 10.70 persen, selanjutnya mengalami penurunan 9.22 persen di empat tahun kedepan yakni pada tahun 2019. Hingga pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 10.19 persen. Dari data statistik tersebut dapat disimpulkan bahwa kemiskinan di Indonesia telah mengalami peningkatan drastis pada tahun 2020 karena kondisi pandemi virus corona.

Keadaan atau data statistik tersebut belum mencapai target yang diinginkan oleh pemerintah, dimana dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 ditetapkan target penurunan tingkat kemiskinan antara 7% hingga 6,5 % , Tentunya hal ini harus menjadi suatu prioritas untuk Pemerintah supaya dapat melakukan usaha penanganan pengentasan kemiskinan secara lebih serius , karena semua warga negara berhak untuk hidup layak dan hidup sejahtera , Selanjutnya Grafik 1.2 menunjukkan data kemiskinan ditingkat provinsi, Jawa Tengah :

Grafik 1.2 Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional, 2020

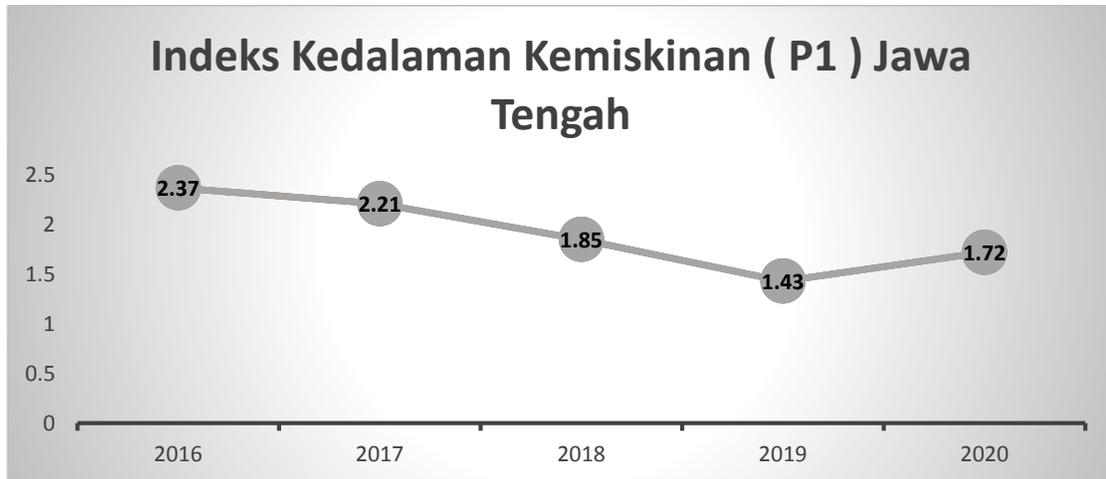
Grafik 1.2 diatas menunjukkan bahwa angka kemiskinan diwilayah Provinsi Jawa Tengah cenderung mengalami penurunan 13.58 persen tahun 2016 menjadi 11.41 % pada tahun 2020. Tetapi yang menjadi sorotan disini adalah grafik angka tahun 2019

dimana penduduk miskin meningkat dari 10.58 persen menjadi 11.41 persen tahun 2020.

Tentunya kondisi ini belum mencapai target pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menargetkan penurunan angka kemiskinan di Tahun 2020 menjadi 9,81 persen. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk terus berupaya melakukan usaha pengentasan kemiskinan supaya mencapai target yang diinginkan dan masyarakat dapat merasakan dampak positif dari usaha tersebut.

Permasalahan kemiskinan tidak hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. *Poverty Gap Index-P1* (Indeks Kedalaman Kemiskinan) adalah dimensi rata-rata ketimpangan pengeluaran dari setiap warga miskin pada garis kemiskinan. Disebutkan apabila nilai indeks kedalam kemiskinan tinggi, maka rata-rata pengeluaran warga dari garis kemiskinan semakin jauh. Sedangkan *Proverty Severity Index- P2* (Indeks Keparahannya Kemiskinan) mendeskripsikan tentang penyebaran pengeluaran dari antara warga miskin. Apabila nilai indeks tinggi , semakin tinggi pula kesenjangan pengeluaran antara warga miskin, berikut merupakan data P1 dan P2 di wilayah Jawa Tengah :

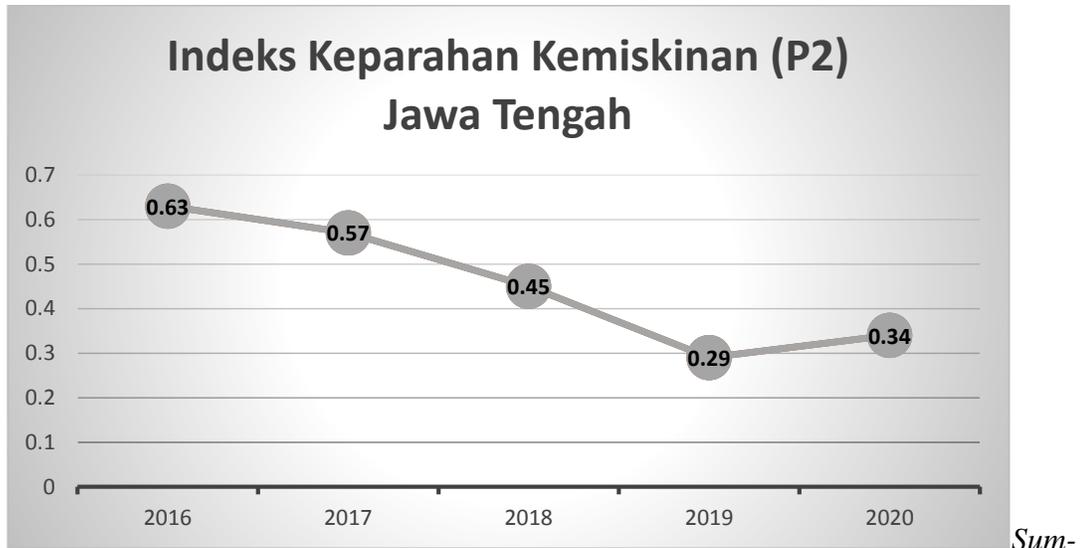
Grafik 1.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan Jawa Tengah Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional, 2020

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Jawa Tengah pada tahun 2016 adalah 2,37 dan terus menurun hingga 1.43 pada tahun 2019, akan tetapi kondisi ini tidak bertahan lama, dimana indeks kedalam kemiskinan di Jawa Tengah pada periode 2020 mengalami peningkatan menjadi 1.72, selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, program pengentasan kemiskinan juga harus dapat mengurangi tingkat kedalam kemiskinan, selain itu indikator lain yang harus dilihat selain tingkat kedalam kemiskinan adalah indeks kedalaman kemiskinan (*Proverty Severity Index- P2*) yang akan dijelaskan pada Grafik 1.4 di bawah ini :

Grafik 1.4 Indeks Keparahan Kemiskinan Jawa Tengah Tahun 2016-2020

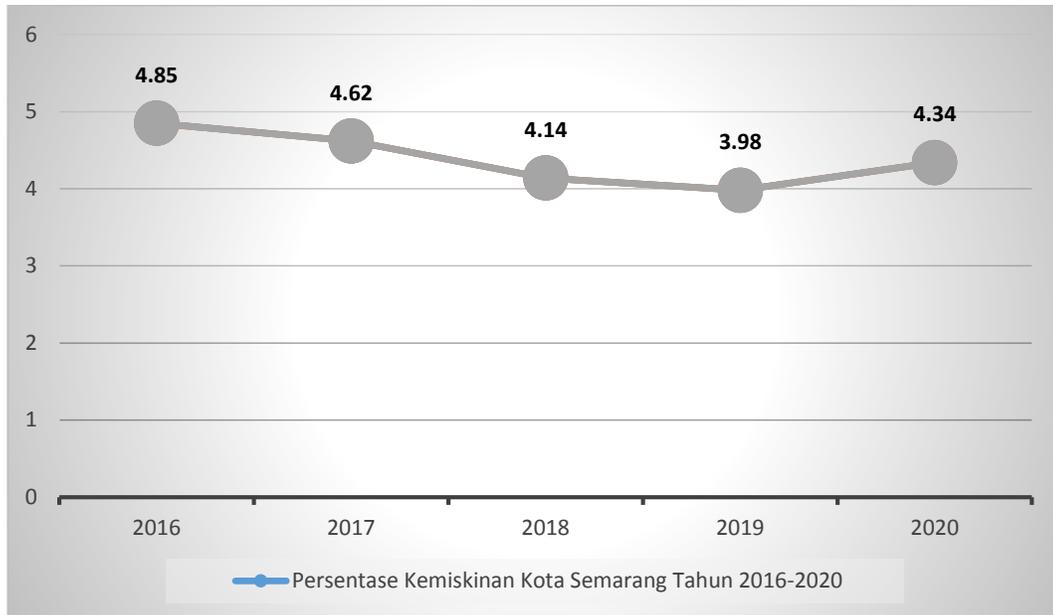


ber : Badan Pusat Statistik, 2020

Indeks keparahan kemiskinan Jawa Tengah pada tahun 2016 adalah 0,62 dan menurun menjadi 0.29 pada tahun 2019, akan tetapi indeks keparahan kemiskinan tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 0.34 artinya orang yang berada dibawah garis kemiskinan semakin banyak ,tentunya kondisi tersebut harus menjadi perhatian bagi pemerintah Provinsi untuk dapat membuat kebijakan pengentasan kemiskinan yang dapat mengurangi angka indeks keparahan kemiskinan di Jawa Tengah.

Dibawah ini adalah data tingkat kemiskinan di Kota Semarang :

Grafik 1.5 Tingkat Kemiskinan di Kota Semarang Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Kemiskinan Kota Semarang mengalami penurunan dari tahun 2016, dengan angka kemiskinan 4.85% menjadi 3.98% pada tahun 2019, akan tetapi pada tahun 2020, angka kemiskinan Kota Semarang mengalami peningkatan menjadi 4.34%. Kemiskinan Kota Semarang juga dapat dilihat dari indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan pada grafik 1.6 berikut :

Grafik 1.6 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Kota Semarang Tahun 2016-2020



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020

Pada periode tahun 2019 hingga tahun 2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan tahun 2019 adalah 0,57 dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 0,68 dan Indeks Keparahan Kemiskinan tahun 2019 0,12 menjadi 0,16 pada tahun 2020. Jika dilihat pada tahun 2016-2019, keadaan nya berbeda, dimana terjadi penurunan Indeks Kedalaman dan Keprahan Kemiskian setiap tahun nya. Sehingga tentu hal ini haru menjadi perhatian bagi pemerintah Kota Semarang untuk terus mengupayakan penurunan angka kemiskinan di Kota Semarang.

Tabel 1.1 Data Warga Miskin Per Kecamatan di Kota Semarang

No	Wilayah Kecamatan	Jiwa	Persentase
1	Semarang Tengah	10.205	4.4 %
2	Semarang Utara	27.245	10 %
3	Tembalang	23.549	9.1%
4	Ngaliyan	14.292	5.1%
5	Genuk	21.109	6.8%
6	Candisari	16.133	6.2%
7	Semarang Timur	19.592	7.1%
8	Gunung Pati	18.789	7.3%
9	Gayamsari	14.569	5%
10	Semarang Selatan	13.159	5.1%
11	Semarang Barat	28.960	10%
12	Mijen	13.613	5.6%
13	Banyumanik	17.914	6.7%
14	Gajah Mungkur	6.841	2.7%
15	Pedurungan	21.004	7.4%
16	Tugu	4.422	1.5%

Sumber : Dinas Sosial Kota Semarang, 2020

Tabel 1.1 menunjukkan angka kemiskinan tertinggi adalah di Kecamatan Semarang Barat dengan angka kemiskinan mencapai 28.960 jiwa . Sebaliknya angka kemiskinan paling rendah adalah di wilayah Kecamatan Tugu dengan angka kemiskinan 4.422 jiwa. Sedangkan Wilayah Kecamatan Semarang Utara merupakan angka kemiskinan tertinggi kedua, dimana angka kemiskinan mencapai 27.245 jiwa.

Kemiskinan tersebut diakibatkan oleh ketidak berhasilan dari program Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan berbagai program kemiskinan seperti program PKH, KIP, dan BPNT. Disamping masyarakat di wilayah Kecamatan Semarang Utara minim partisipasi dalam pelaksanaan program-program pemerintah. Dit-

ambah mayoritas warga miskin tinggal di wilayah pesisir yang sering menghadapi kondisi sulit seperti bencana banjir, rob, kekurangan air bersih, dan wilayah kumuh. Tentu partisipasi merupakan suatu hal yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan ataupun program sehingga program bisa memberikan dampak yang baik bagi masyarakat.

Tabel 1.2 menjelaskan Statistik Kemiskinan Dikelurahan Tanjung Mas :

Tabel 1.2 Data Kemiskinan di Wilayah Kelurahan Tanjung Mas

No	Kelurahan	Kriteria Kemiskinan	
		Hampir Miskin	Miskin
		Jiwa	Jiwa
1	Bululor	3.814	1.003
2	Plombokan	2.388	1.284
3	Panggung Kidul	2.203	375
4	Panggung Lor	177	11
5	Kuningan	3.739	498
6	Purwosari	2.341	249
7	Dadapsari	3.762	790
8	Bandarharjo	7.426	1.457
9	Tanjung Mas	12.100	2.909

Sumber : SIMGAKIN KOTA SEMARANG, 2020 (Proyeksi dari rata-rata angka kemiskinan Kota Semarang)

Tabel 1.2 merupakan data proyeksi dari rata-rata kenaikan angka kemiskinan Kota Semarang tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, yaitu 4.38 %. Tabel 1.2 menunjukkan kondisi Kelurahan Tanjung Mas sebagai wilayah kelurahan dengan angka kemiskinan tertinggi dari seluruh wilayah kelurahan di Kecamatan Semarang Utara, dengan total 12.100 jiwa penduduk dengan kriteria hampir miskin dan 2.909 jiwa penduduk dengan kriteria miskin. Ringkasnya Kelurahan Tanjung Mas menjadi prioritas program pengentasan kemiskinan karena memiliki angka kemiskinan tertinggi.

Selaras dengan agenda global *Sustainable Development Goals* (SDGs), dimana tujuan yang pertama adalah Pengetasan Kemiskinan atau No Poverty, Maksudnya adalah tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia. Kemiskinan merupakan salah satu isu global yang sampai saat ini menjadi perhatian dari berbagai negara. Untuk menyikapi hal tersebut, SDGs menjadikan kemiskinan menjadi tujuan pertama yang harus diperhatikan dan diatasi. Sedangkan untuk regulasi nasional yang mengatur tentang kemiskinan yaitu,

UU No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235) mendeskripsikan tentang suatu target dan tujuan Pemerintah sesuai dengan yang diamanahkan di Pembukaan UU D Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu memajukan dan menciptakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan kata lain, *state* bertanggung jawab atas kesejahteraan seluruh penduduk atau warga negara keadaan dan kondisi kefakiran dan kemiskinan.

Tanggung jawab yang diemban oleh negara tersebut dapat diusahakan dengan usaha paling mendasar yaitu penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar. Usaha tersebut harus menjadi perhatian khusus dalam pembangunan di Indonesia yaitu mengentaskan kemiskinan. Karena sampai saat ini, kebijakan pengentasan kemiskinan lebih cenderung general dan parsial, oleh karena itu dibutuhkan suatu kebijakan yang secara spesifik mengatur tentang pengentasan kemiskinan. (*Sumber : Pemerintah Indonesia.2011. Undang-Undang No 13 Tahun 2011*)

Selain itu ada juga PERPRES No 96 Tahun 2015 Perubahan dari Regulasi PERPRES No 15 Tahun 2010 yaitu percepatan dalam pengentasan kemiskinan. Dalam mendukung juga membatu terlaksananya tujuan dan tugas dari Tim yang telah dibentuk, di perlukan adanya penyesuaian terhadap komposisi anggota Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan regulasi yang ada di PERPRES No 15 Tahun 2010 sebelumnya, dimana dijelaskan di pasal satu, bahwa anggota Tim yang dibentuk untuk percepatan penanggulangan kemiskinan terdapat dari unsur *state*, *private*, *society* dan NGO lain yang mempunyai hubungan dalam pengentasan kemiskinan. Artinya pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat maupun swasta untuk ikut andil dalam usaha pengentasan kemiskinan. Hal ini memang sangat penting, karena kerja sama antara Pemerintah, masyarakat dan swasta adalah kekuatan untuk melaksanakan program penanggulangan kemiskinan tersebut. (*Sumber : Pemerintah Indonesia.2015. PERPRES No 96 Tahun 2015*).

Regulasi yang mengatur tentang penanggulangan kemiskinan yaitu Perda Kota Semarang No 12 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2017. Implementasi dari kedua payung hukum tersebut diusahakan dari beberapa upaya berikut, yaitu :

1. Meminimalisir tanggungan kebutuhan sehari-hari agar warga miskin bisa mencukupi kebutuhan hidup bersama keluarganya, antara lain bantuan pangan non tunai, bea siswa miskin, angkutan BRT, pelayanan kesehatan dengan BPJS, UHC dan ambulance hebat di Kota Semarang ;
2. Penduduk miskin bisa mencukupi kebutuhan hidup layak dan memiliki akses dalam pelayanan dasar pelayanan dan peningkatan akses air bersih, mencegah BAB sembarangan, penanganan RTH dan peningkatan taman kota sebagai sarana rekreasi keluarga;
3. Memperbesar ruang akses pelayanan public terhadap penduduk/ warga miskin seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, pelatihan skill, rumah belajar, perbaikan kampung tematik. (Sumber : Pemerintah Kota Semarang.2017. Peraturan Daerah No 11 Tahun 2017)

Implementasi program dapat berjalan apabila melibatkan *Stakeholders* lain khususnya dari sektor Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah sektor swasta dan akademisi dengan berbagai program seperti pelatihan dan pengabdian. Tentunya pemerintah daerah Jateng juga berusaha melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan dengan beberapa cara dan usaha seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, tentunya usaha ini diharapkan dapat berjalan sesuai dengan target dan tujuan dari pemerintah dalam usaha pengentasan kemiskinan.

Melihat beberapa data dan regulasi terkait kemiskinan diatas, yang ada keperluan (urgensi) untuk memahami adanya berbagai stakeholder dan peran dari setiap stakeholder dalam usaha menanggulangi masalah kemiskinan di wilayah Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Dalam hal ini intergrasi peran antara stakeholder sangatlah juga diperlukan, Setiawan B & Nurcahyanto, H. (2020) yang meneliti peran *stakeholders* dalam implementasi kebijakan penanggulangan angka kematian ibu di Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Dimana penelitian ini menjelaskan bahwa stakeholder yang terlibat dalam penanggulangan angka kematian ibu seperti Dinas Kesehatan Kota Semarang, Tenaga Kesehatan, IBI Kota Semarang, PKK Kecamatan Pedurungan. FKK, Kecamatan, Kelurahan, RT, RW, Keluarga, Dunia Usaha, dan Institusi Pendidikan berpengaruh dalam menentukan keberhasilan penanggulangan penanggulangan angka kematian ibu di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Ini karena kolaborasi yang terjadi diantara *stakeholders* yang berkepentingan dalam penanggulangan angka kematian ibu adalah kunci keberhasilan implementasi dari setiap program pengentasan kemiskinan yang dijalankan.

Tidak jarang ditemukan juga konflik antar *Stakeholders* dalam usaha pengentasan kemiskinan. Menurut Choi dan Sirakaya (2006) permasalahan yang sering ditemui dalam pengentasan kemiskian adalah minimnya kerjasama dari setiap *Stakeholders*. *Misalnya*, minimnya partisipasi masyarakat dan lemahnya kebijakan pemerintah. Dengan beberapa alasan itulah koordinasi dalam jaringan *stakeholders* dianggap pent-

ing dan peran yang dilakukan setiap stakeholder adalah kunci keberhasilan dalam implementasi program pengentasan kemiskinan kelompok nelayan di Kelurahan Tanjung Mas.

Dalam memahami peran *Stakeholders* dalam pengentasan kemiskinan kelompok nelayan tersebut, Nugroho (dalam Fitri & Hardi, 2017 : 3) mengklasifikasikan peran *Stakeholders* seperti berikut :

- a. *Policy creator* , merupakan *Stakeholders* dengan peran sebagai pengambil dan penentu suatu kebijakan
- b. Koordinator, merupakan *Stakeholders* yang mempunyai peran untuk mengkoordinasikan *Stakeholders* lain yang ada dalam suatu kebijakan
- c. Fasilitator yakni sebagai *Stakeholders* yang berperan memfasilitasi juga mencukupi apa saja yang diperlukan masyarakat.
- d. Implementor yakni *Stakeholders* yang berperan untuk melaksanakan kebijakan dimana didalamnya termasuk kelompok sasaran
- e. Akselarator yakni *Stakeholders* yang berperan membantu dan mempercepat pelaksanaan suatu program .

Dalam proses pembangunan , jaringan *Stakeholders* yang ada dalam pengentasan kemiskinan kelompok nelayan di wilayah Kelurahan Tanjung Mas masih belum menunjukkan integrasi maksimal. Artinya bahwa masih belum adanya suatu sinergitas antar *Stakeholders* , contohnya : sejumlah masyarakat nelayan dari kelurahan Tanjung Mas tidak menyadari di wilayah tersebut sudah ada Gedung yang dijadikan sebagi

Pasar untuk tempat penjualan hasil tangkapan laut. Mereka masih saja memilih untuk menjual hasil tangkapan di pinggir jalan, Fakta ini menunjukkan bahwa jaringan *Stakeholders* dalam pengentasan kemiskinan di wilayah Kelurahan Tanjung Mas belum maksimal. Program pemerintah yang dibuat untuk memudahkan nelayan belum dapat dimaksimalkan. Apakah ini kesalahan dari pemerintah daerah dalam hal ini kurangnya sosialisasi dari fungsi gedung tersebut. Atau apakah masyarakat nelayan yang masih belum berpartisipasi dalam setiap program pemerintah.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melihat lebih mendalam bagaimana jaringan dan peran apa saja yang dilakukan oleh setiap *Stakeholders* dalam pengentasan kemiskinan kelompok nelayan, dengan judul penelitian “ ***Peran Stakeholders dalam Pengentasan Kemiskinan Kelompok Nelayan Kota Semarang di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara*** “ini bertujuan agar penelitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam mengkaji peran *Stakeholders* yang tepat untuk pengentasan atau penanganan kasus kemiskinan sehingga tercapai tujuan dari seluruh *Stakeholders* baik pemerintah maupun masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan.

1.2 Identifikasi Masalah

- a. Sebagian masyarakat belum berpartisipasi dalam program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan
- b. Sosialisasi pemerintah daerah masih kurang optimal untuk menarik partisipasi masyarakat

- c. Masih tingginya angka kemiskinan khususnya masyarakat nelayan di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang
- d. Akses pendidikan yang masih rendah di Wilayah Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang
- e. Wilayah Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang masih tergolong kumuh
- f. Belum terjalin sinergitas antara pemerintah daerah dengan masyarakat dalam usaha pengentasan kemiskinan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dalam penelitian ini secara khusus pokok-pokok permasalahan yang ingin dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana identifikasi jaringan *Stakeholders* dalam mengatasi masalah kemiskinan kelompok nelayan di Kelurahan Tanjung Mas?
2. Bagaimana peran setiap *Stakeholders* dalam mengurangi kemiskinan kelompok nelayan di Kelurahan Tanjung Mas?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi jaringan *Stakeholders* dalam mengatasi masalah kemiskinan kelompok nelayan di Kelurahan Tanjung Mas
2. Untuk mendeskripsikan peran dari setiap *Stakeholders* dalam mengurangi kemiskinan kelompok nelayan di Kelurahan Tanjung Mas.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan terhadap pengembangan teori-teori ilmu sosial dan politik secara umum dan pengembangan pada bidang kebijakan publik terkait dengan jaringan *Stakeholders*.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Selain kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi :

a. Penulis

Dengan adanya penelitian ini, penulis diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai jaringan *Stakeholders* dalam pengentasan kemiskinan di Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang.

b. Universitas

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan jaringan *Stakeholders* dalam pengentasan kemiskinan.

c. Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai peran masyarakat dalam pengentasan kemiskinan yang memang sangat dipengaruhi oleh partisipasi dan dukungan dari masyarakat itu sendiri terhadap usaha dan program pemerintah.

1.6 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1 Penelitian Terdahulu (State of The Art)

No	Penelitian Terdahulu	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe Di Kabupaten Rembang	Tujuan penelitian ini untuk 1) mengidentifikasi dan menganalisis peran stakeholders dalam mengembangkan wisata pantai Karang Jahe, 2) merumuskan upaya untuk mengatasi faktor penghambat peran stakeholders dalam pengembangan wisata pantai Karang Jahe di kabupaten rembang.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pariwisata Pengembangan Pantai Karang Jahe melibatkan peran Dinbudparpora, masyarakat sekitar, dan pengusaha. Peran yang dijalankan oleh masing-masing pemangku kepentingan antara lain pembuat kebijakan, koordinator, fasilitator, pelaksana dan akselerator. Peran stakeholders dalam pembangunan pariwisata lebih banyak penekanan pada peran fasilitator dalam bentuk fisik.	Perbedaannya terletak pada lokus penelitian, dimana Penelitian yang dilakukan pada tahun 2017 berlokus di Kab. Rembang dan pada penelitian ini lokusnya adalah di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara.
2	Inovasi Kebijakan Strategi Terpadu Menurunkan Kemiskinan (Studi kasus Kota Semarang) Oleh : Rahmad Purwanto W (2019)	Program inovasi memiliki tujuan yaitu: (1) mengurangi beban biaya hidup orang miskin dan (2) program yang langsung ditargetkan kemiskinan.	Implementasi program inovasi dalam konteks pengentasan kemiskinan adalah semakin ditingkatkan dengan melibatkan para pemangku kepentingan dari komunitas bisnis (melalui Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan / CSR), universitas melalui Program Layanan Masyarakat Tematik dan Penelitian dan Pengabdian	Perbedaannya terletak pada Lokus penelitian. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 berlokus di Kota Semarang sedangkan penelitian ini berlokus di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara

No	Penelitian Terdahulu	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
			kepada Masyarakat, Organisasi Non-Pemerintah dan Partisipasi Publik baik dari kalangan ulama (melalui Basis, beasiswa sebaya, anak-anak asuh dan lainnya) meningkatkan pendidikan, kesehatan dan usaha mikro / kecil perintis	
3	Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau	Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi stakeholders yang terlibat, menganalisis peran stakeholders, menganalisis hubungan antar stakeholders, dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan destinasi pariwisata halal Pulau Penyengat melibatkan stakeholders dengan konsep pentahelix, terdiri dari akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah dan media massa. Terdapat 38 stakeholders yang terlibat dan diklasifikasikan ke dalam stakeholders primer, kunci dan sekunder. Peran stakeholders tercermin dalam peran policy creator, koordinator, fasilitator, implementor dan akselerator. Hubungan antar stakeholders dilihat dari bentuk dan aktivitasnya.	Perbedaannya terletak pada lokus penelitian, dimana Penelitian yang dilakukan pada tahun 2020 berlokus di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau sedangkan pada penelitian ini lokusnya adalah di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara

No	Penelitian Terdahulu	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
4.	Analisis Peran Stakeholders Dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Angka Kematian Ibu Studi Kasus Kecamatan Pedurungan Kota Semarang	Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis peran stakeholders dalam implementasi kebijakan penanggulangan angka kematian ibu di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang	Hasil Penelitian menunjukkan stakeholder Kunci adalah Dinas Kesehatan Kota Semarang mempunyai peran sebagai policy creator, fasilitator, akselerator, dan koordinator. Stakeholders primer adalah Tenaga Kesehatan (Bidan) memiliki peran sebagai fasilitator, implementer, dan koordinator, IBI Kota Semarang, PKK Kecamatan Pedurungan dan FKK berperan sebagai fasilitator, implementator dan koordinator. Stakeholders Skunder terdiri dari Kecamatan, Kelurahan, RT, RW, keluarga, Institusi pendidikan dan Dunia Usaha yang masing-masing berperan sebagai fasilitator.	Perbedaannya terletak pada lokus penelitian, dimana Penelitian yang dilakukan pada tahun 2020 berlokus di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau sedangkan pada penelitian ini lokusnya adalah di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara
5.	kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Dengan Menggunakan Pendekatan Sistem Informasi Geografis Dan CHART PRIORITY (Studi Kasus Kota Semarang) Oleh : Mohammad Mukhtali (2017)	Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui implementasi sebuah program atau gerakan terpadu yang memprioritaskan penanganan kemiskinan di setiap kelurahan dan kecamatan di Kota Semarang yang masih terdapat penduduk di bawah garis kemiskinan.	Berdasarkan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan Sistem Informasi Geografis (SIG) dan Chart Priority, dapat disimpulkan adanya ketidaksinkronan secara sektoral dan spasial terkait program/kebijakan dan alokasi anggaran dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Semarang.	Perbedaannya terletak pada Lokus penelitian. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2017 berlokus di Kota Semarang sedangkan penelitian ini berlokus di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara

No	Penelitian Terdahulu	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
6.	Jaringan <i>Stakeholders</i> Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Studi Kasus : Di Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan. Oleh : Purna Irawan , Alfitri , Ardiyan Saptawan (2019)	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana jaringan <i>Stakeholders</i> dalam pemberdayaan masyarakat pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).	Hasil penelitian adalah relasi individu antar <i>Stakeholders</i> dalam pemberdayaan pada Program KOTAKU masih bersifat simetris dan kesetaraan dengan ikatan yang kuat dan ada juga ikatan lemah antar <i>Stakeholders</i> . Relasi antar institusional/kelembagaan bersifat asimetris dengan ikatan <i>Stakeholders</i> yang dominan berupa relasi kerja dan ikatan yang lemah berupa relasi kekerabatan.	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2019 berfokus pada Jaringan <i>Stakeholders</i> Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sedangkan penelitian ini berfokus pada jaringan <i>Stakeholders</i> dalam mengatasi kemiskinan di daerah kelurahan Tanjung Mas, kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.
7.	Struktur Jaringan Komunikasi dan Peran <i>Stakeholders</i> Dalam Penerapan Teknologi Budidaya Kentang (Petani Kentang Studi Kasus : Desa Ngantru Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang). Oleh Dedy Hertanto, Sugiyanto , Reza Safitri (2016)	Tujuan penelitian adalah (1) mendeskripsikan struktur jaringan komunikasi dan peran <i>Stakeholders</i> (2) Mendeskripsikan karakteristik individu dan karakteristik usahatani (3) Meng hubungan antara jaringan komunikasi dan penerapan teknologi budidaya kentang.	Hasil penelitian menunjukkan (1) Struktur jaringan bersifat menyebar dan memusat dengan tingkat keterhubungan antar <i>Stakeholders</i> yang rendah, sedangkan <i>Stakeholders</i> yang berperan penting pada aspek (bibit dan panen) adalah <i>Stakeholders</i> 10, 12, 35, 61 dan pada aspek (pemupukan dan HPT) adalah <i>Stakeholders</i> 11, 76, 60, dan 50. (2) Karakteristik individu dan usahatani merupakan <i>Stakeholders</i> pendukung	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2016 berfokus pada Struktur Jaringan Komunikasi dan Peran <i>Stakeholders</i> Dalam Penerapan Teknologi Budidaya Kentang sedangkan penelitian ini berfokus pada jaringan <i>Stakeholders</i> dalam mengatasi kemiskinan di

No	Penelitian Terdahulu	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
			dalam meningkatkan keterhubungan antar <i>Stakeholders</i> dan peranan <i>Stakeholders</i> dalam jaringan komunikasi. (3) Hubungan antara jaringan komunikasi dengan penerapan teknologi budidaya kentang menunjukkan hubungan yang positif dan nyata.	daerah kelurahan Tanjung Mas, kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.
8.	Peran <i>Stakeholders</i> Dalam Formulasi Kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Studi Kasus : Di kelurahan Komijen , Kota Semarang . Oleh : Husnul Yakin, Susi Sulandari, Dyah Lituhayu (2013)	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk medeskripsikan Bagaimana peran <i>Stakeholders</i> dalam perumusan kebijakan untuk PNPM-MP di Desa Kemijen Kota Semarang?; Apa saja kendala dalam implementasi PNPM-MP? Dan bagaimana cara menangani kelemahan dalam implementasi PNPM-MP?	Adapun hasil kesimpulan yang diperoleh dari penulisan ini adalah: a. Dalam proses formulasi kebijakan harus dijelaskan posisi masing-masing <i>Stakeholders</i> , baik <i>Stakeholders</i> yang berasal dari unsure pemerintah maupun <i>Stakeholders</i> dari masyarakat. b. Dalam hal aksesibilitas <i>Stakeholders</i> untuk mewujudkan aspirasinya, hal tersebut dapat dilakukan dengan membuat akses pada pemerintahan dengan tingkat yang lebih tinggi misalnya kecamatan. Dalam hal ini lurah selaku <i>Stakeholders</i> pemerintah dapat memfasilitasi hal tersebut dengan cara membuka jejaring dengan pemerintah atasnya yaitu kecamatan dan kabupaten.	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Peneliti yang dilakukan pada tahun 2013 berfokus pada PERAN <i>STAKEHOLDERS</i> DALAM FORMULASI KEBIJAKAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI sedangkan penelitian ini berfokus pada jaringan <i>Stakeholders</i> dalam mengatasi kemiskinan di daerah kelurahan Tanjung Mas, kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.
9.	Peran Multi <i>Stakeholders</i> dalam Im-	Penelitian ini bertujuan untuk	Hasil dari penelitian ini menunjukkan Implementasi kebijakan Minapolitan	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Peneliti

No	Penelitian Terdahulu	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
	plementasi Kebijakan Minapolitan Berbasis Sustainable Development (Studi Kasus pada Pilot Project Minapolitan Desa Srowo Kecamatan Sidayu Gresik). Oleh : Saiful Ulum, Bambang Santoso Haryono, Mochammad Rozikin (2013)	menganalisa implementasi kebijakan Minapolitan dan peran multi <i>Stakeholders</i> dalam kemitraan berbasis sustainable development di Desa Srowo Kecamatan Sidayu	di Desa Srowo sampai sejauh ini belum optimal, hal ini dikarenakan pemerintah tidak mampu mengkomunikasikan dan memberikan pemahaman kebijakan minapolitan kepada masyarakat. Selain itu di Desa Srowo juga belum terdapat sarana teknologi untuk mewujudkan tujuan Minapolitan.	n yang dilakukan pada tahun 2013 berfokus pada Peran Multi <i>Stakeholders</i> dalam Implementasi Kebijakan Minapolitan Berbasis Sustainable Development sedangkan penelitian ini berfokus pada jaringan <i>Stakeholders</i> dalam mengatasi kemiskinan di daerah kelurahan Tanjung Mas, kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.
10.	Peran <i>Stakeholders</i> implementasi Dalam Kebijakan pengelolaan Sampah Studi Kasus : DI Kota Semarang. Oleh : Reflay Ade Sagita, Ida Hayu, Tistik Djumiarti (2013)	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan mengimplementasi peran <i>Stakeholders</i> di PT kebijakan pengelolaan sampah di Semarang. Dan untuk memunculkan solusi untuk <i>Stakeholders</i> penghambat pada <i>Stakeholders</i> implementasi peran pelaksana dalam kebijakan pengelolaan sampah di Semarang	Hasil Dari penelitian ini menunjukkan Peran Birokrasi Pemerintah dalam kebijakan pengelolaan sampah yakni, penyelenggaraan pengelolaan sampah oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan Perda Pengelolaan Sampah. Ini terlihat dari masih belum lengkapnya alat-alat yang digunakan dalam proses pengelolaan sampah, selain itu <i>Stakeholders</i> yang menjadi penghambat utama <i>Stakeholders</i> implementasi kebijakan pengelolaan sampah antara lain : Bagi	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2013 berfokus pada Analisis Peran <i>Stakeholders</i> dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah sedangkan penelitian ini berfokus pada jaringan <i>Stakeholders</i> dalam mengatasi kemiskinan di daerah kelurahan Tanjung Mas, kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.

No	Penelitian Terdahulu	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
			Birokrasi Pemerintah adalah minimnya anggaran yang tersedia dalam proses pengelolaan sampah.	

Penelitian terdahulu diatas akan digunakan sebagai referensi dan kajian pustaka pada penelitian peran *stakeholders* dalam pengentasan kemiskinan kelompok nelayan di Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.

1.6.2 Administrasi Publik

Chandler dan Plano dalam Keban (2004 : 3), mengatakan bahwa Administrasi Publik adalah proses dimana sumber daya dan personal public diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Chandler dan Plano menjelaskan bahwa administrasi public merupakan seni dan ilmu (*art and science*) yang ditunjukkan untuk mengatur kepentingan publik juga untuk mengimplementasikan beberapa tanggung jawab yang telah diatur. *Public administration* merupakan studi atau bidang ilmu yang ditujukan agar dapat menyelesaikan masalah publik dengan cara memperbaiki khususnya bidang organisasi public, SDM, dan ekonomi.

Menurut pendapat Jhon Pfifner & Robert V.P (1960 :4) mendeskripsikan *Public Administration* sebagai berikut : a) Pelaksanaan kebijakan dari pemerintah yang sudah disetujui oleh badan legislatif . b)Kerjasama antar individu atau kelompok untuk

mengimplementasikan suatu kebijakan yang telah dibuat pemerintah Suatu bentuk proses yang menyangkut pada implementasi dari kebijakan yang telah dibuat pemerintah, membahas tentang kesiapan dan cara-cara yang dibuat untuk menunjukkan arah dan maksud kepada upaya pelaku kebijakan

Ahli Felix A. Nigro dan Loyd G Nigro (1970 :21) mendeskripsikan *public administration* sebagai berikut :

1. Bentuk koordinasi dalam lingkaran pemerintahan
2. Mencakup 3 badan pemerintah : Badan eksekutif, Badan Legislatif, Badan Yudikatif , dan juga membahas tentang bagaimana koordinasinya
3. Memiliki peran yang sangat penting didalam pembuatan suatu kebijakan, proses ini juga mencakup bagian dari proses suatu politik
4. Berhubungan erat dengan berbagai jenis organisasi swasta (*private*) dalam memberikan pelayanan terhadap suatu kelompok masyarakat
5. Untuk masalah tertentu, dibedakan dengan yang namanya administrasi perorangan dalam satu kebijakan.

David H Rosenbloom (2005) menjelaskan dimana *public administration* mencakup tentang pelaksanaan teori dan proses manajemen, politik, dan hukum agar mencapai tujuan dari pemerintah , bidang eksekutif dan legislatif yaitu tentang tugas dalam membuat regulasi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat luas Dari penjelasan konsep tersebut, dapat disimpulkan bahwa *public administration* merupakan suatu bentuk koordinasi, sinergitas ataupun kerjasama antar berbagai *Stakeholders*, khususnya pada

pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Menurut pendapat ahli, Inu Kencana Syafie (1999 :28), menjelaskan definisi paradigma yaitu merupakan suatu standar dari disiplin ilmu dilihat dari fokus juga lokusnya, sedangkan Nicholas Henry (1988 : 33-54) , menyebutkan terdapat 5 paradigma *public administration* ,yaitu sebagai berikut :

Paradigma yang pertama, yaitu Prinsip-Prinsip Administrasi Negara (1927-1937). Dimana dalam paradigma ini, lokus administrasi publik tidak terlalu diprioritaskan, melainkan yang dipentingkan adalah fokus dari administrasi public tersebut. Prinsip-Prinsip Admnistrasi bisa bersifat luas dan berlaku untuk semua bentuk organisasi juga semua sektor sosial & budaya. Prinsipnya adalah Administrasi Publik bisa diberlakukan di negara manapun bahkan negara yang memiliki ciri khas budaya, lingkungan wilayah, dan visi yang berbeda.

Paradigma Kedua, yaitu Dikotomi Politik & Administrasi (1900-1926) , dimana menurut paradigma ini , administrasi publik hanya berfokus kepada permasalahan suatu keorganisasian, pegawai juga perancangan anggaran di pemerintahan, sedangkan permasalahan seperti politik, pemerintahan dan kebijakan adalah substansi sektor politik. Lokus pada paradigma kedua ini yaitu membahas tentang posisi yang seharusnya admnistrasi publik berada.

Paradigma yang ketiga, yaitu Administrasi Publik sebagai Ilmu Politik (1950-1970), dimana siklus paradigma ketiga ini adalah suatu bentuk upaya untuk menjelaskan keterkaitan dalam konsep administrasi public dengan ilmu politik.

Paradigma yang Keempat, yaitu Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1954-1970), dimana pada paradigma ini, administrasi public sudah dikembangkan menjadi ilmu administrasi. Perubahan ini dimulai dari anggapan bahwa ilmu administrasi merupakan ilmu tahap kedua dari ilmu politik.

Paradigma yang Kelima, Administrasi Negara sebagai ilmu Administrasi Negara (setelah 1970),, dimana pada fase ini, administrasi negara sudah dikembangkan menjadi satu ilmu administrasi negara, yaitu membahas tentang teori keorganisasian, ilmu kebijakan, dan ekonomi politik.

Paradigma keenam, Governance (1990-sekarang), paradigma ini menekankan perubahan persepsi pemerintah dan administrasi. Perubahan dicatat dalam tiga klasifikasi yaitu globalisasi, redefinisi, dan devolusi. Globalisasi menggabungkan perusahaan multinasional, internet, isu-isu lingkungan dan perdagangan internasional. Redefinisi melibatkan proses yang sebenarnya yang bergerak dari kekuasaan hierarki menuju kolaborasi dan kemitraan. Devolusi menitikberatkan pada partisipasi warga negara, kelompok warga, dan kemitraan swasta publik dalam kegiatan urusan publik. Pemerintah telah melibatkan sektor swasta, masyarakat, dan teknologi didalam mengatasi setiap kebijakan dan permasalahan publik.

1.6.4 Kebijakan Publik

Apabila dipandang dari segi terminologi, Kebijakan Publik memiliki definisi yang cukup beragam, Easton mendefinisikan *public policy* merupakan *the authoritative allocation of values for the whole society* atau merupakan alokasi nilai-nilai dengan cara paksa ke semua elemen masyarakat, sedangkan Ahli Laswell dan Kaplan mendefinisikan *public policy* sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai dan norma kedalam suatu praktek yang terukur.

William N. Dunn (1994) mendefinisikan Kebijakan publik merupakan satu proses pemilihan yang saling berkaitan yang diciptakan oleh birokrat atau birokrasi di sektor-sektor yang membahas mengenai tanggung jawab pemerintah, diantara lain keamanan pertahanan, energy, *health, education*, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, dan perkotaan.

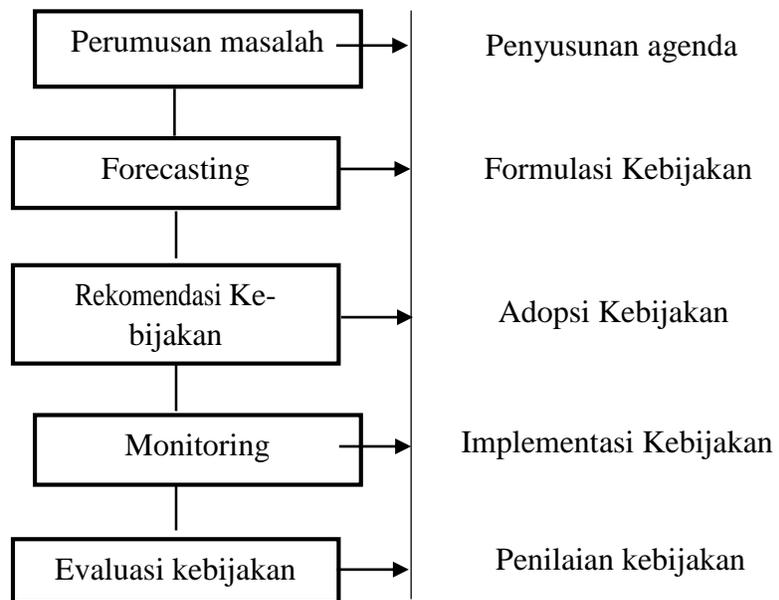
Kebijakan Publik menurut pendapat Thomas R. Dye (1981), yaitu "Apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan". Menurut beliau apabila birokrasi mencoba memilih untuk melakukan tindakan atau suatu aksi, tentunya tindakan tersebut harus memiliki tujuan yang objektif, selain itu Kebijakan Publik menurut Thomas yaitu mencakup apapun pilihan dan aksi dari pemerintah.

Ahli Chaizi Nasutha (2004 :37) mengemukakan definisi *public policy* merupakan suatu bentuk wewenang dari birokrasi atau pemerintah untuk membuat suatu *policy* yang tentunya ditujukan dan berfungsi kepada perangkat peraturan-peraturan hukum dalam satu negara, dimana *policy* yang dibuat itu mempunyai tujuan agar menggaet

dinamika social dari masyarakat, dan tentunya hal itu akan menjadi suatu acuan dalam pembuatan kebijakan supaya terjadinya kondisi harmonis dalam hubungan sosial.

1.6.5 Proses Kebijakan Publik

Proses Kebijakan Publik merupakan seluruh kegiatan intelektual yang didalam prosesnya tidak bisa lepas dari aspek politis. Dimana ada beberapa tahap yang akan berjalan dalam menghasilkan suatu kebijakan baru , dimana proses tersebut untuk menghasilkan kebijakan tersebut dapat dilihat dari tahapan-tahapan kebijakan sebagai berikut :



Sumber : William N Dunn, (1994 :17)

1.6.6 Teori Jaringan Stakeholders dan Peran Stakeholders

Robert M. Z Lawang (dalam Damsar, 2011) berpendapat bahwa jaringan adalah gabungan kata net dan work atau dengan kata lain network, dimana penekanannya

ada di konsep jaringan tersebut, dipahami kedalam kondisi yang menjelaskan bagaimana hubungan antar individu bekerja dalam suatu jaringan. Tokoh sosiologi Bruno Latour (2005) menjelaskan bahwa pengertian jaringan *Stakeholders* adalah sbb. Pertama, jaringan *Stakeholders* mendeskripsikan bahwa apa yang digambarkan mengambil bentuk jaringan, yang kenyataannya belum tentu demikian. Kedua, jaringan *Stakeholders* tidak memiliki apriori dalam bentuk hubungan, tidak terikat dengan mitos yang ada baik dari kalangan atas (elit) ataupun bawah (masyarakat), serta tidak terikat asumsi makro atau mikro yang berkembang

Walsham dan Sahaya dalam (Yuniningsih,2019 : 81) berpendapat bahwa jaringan *Stakeholders* merupakan jaringan heterogen penyesuaian kepentingan, yang didalamnya mencakup manusia, keorganisasian dan standarisasi. Jaringan *Stakeholders* akan mendeskripsikan tentang proses jaringan material-semiotik bersama-sama untuk bertindak sebagai keseluruhan; pendapat ANT yang khusus yaitu aksi dan *Stakeholders* adalah adanya keagenan manusia dan non-manusia (objek-objek teknis) (Callon and Law, 1989; Callon, 1991). Perbedaan fundamental antara keagenan manusia dan non-manusia (objek dan unsur teknis) yaitu agen manusia mempunyai opsi pilihan, menumpulkan opsi pilihan tersebut, juga berharap sesuatu dari aksi-aksinya. Sedangkan , agen nonmanusia (material) tidak mempunyai opsi pilihan. ANT melihat perbedaan ini tidak sesuai dengan empirik atas aksi. Terkait tujuan, atribut aksi bisa diberikan juga kepada beberapa objek teknis, karena walaupun manusia merupakan inisiator aksi, proses beraksi tidak semuanya ada dalam kendali inisiator tersebut.

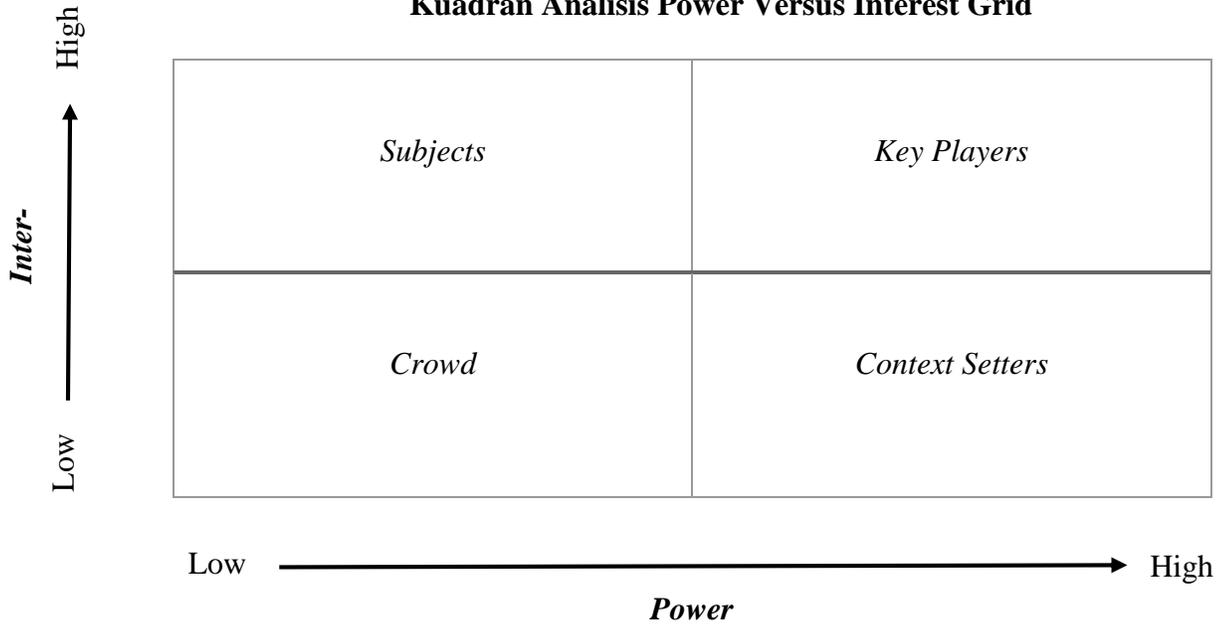
Semua unsur manusia dan non-manusia mempunyai peran didalam menjaga keutuhan jaringan karena jaringan heterogen adalah suatu hal yang sangat fundamental untuk ANT. Jaringan & aksi adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan Karena aksi memperoleh sumbernya dari jaringan dan jaringan dibentuk dari aksi-aksi tersebut. Dilihat dari sisi jejaring kebijakan publik menurut UN ESCAP (dalam Yuniningsih, 2018), yang membahas tentang konsep *governance* dan *Stakeholders* yang ada didalam perumusan suatu kebijakan yaitu pemerintah, militer, juga masyarakat sipil) dimana konsep itu juga mendeskripsikan bagaimana implementasi dari suatu kebijakan baik dari segi formal ataupun informal.

Konsep *Stakeholders* juga dijelaskan oleh Howlett dan M. Ramesh (dalam Yuniningsih, 2018:56), yaitu *stakeholders* kebijakan ada didalam suatu *policy sub-system* , seperti didalam sistem organisasi internasional, organisasi masyarakat dan organisasi pemerintah atau lebih spesifik dijelaskan bahwa *Stakeholders* kebijakan adalah : 1) elected officials (eksekutif, legislatif juga yudikatif) , 2) appointed officials , 3) kelompok kepentingan, 4) organisasi riset dan 5) media massa, dimana *Stakeholders* tersebut saling berkomunikasi dalam menentukan suatu pilihan setuju(pro) atau tidaksetuju (kontra) atas suatu kebijakan tertentu dan komunikasi tersebut akan membentuk koalisi.

Dalam mengidentifikasi jaringan *Stakeholders*, Bryson (2004 : 15) menjelaskan bahwa dalam memetakan *Stakeholders* dapat dilakukan dengan 8 teknik tetapi apabila dikaitkan dengan penelitian ini, teknik pemetaan *Stakeholders* yang digunakan

adalah *Power Versus Interest Grid*. Teknik Analisis ini fokus utamanya adalah *power* dan *interest*.

Gambar 1.1 Kuadran Analisis Power Versus Interest Grid
Kuadran Analisis Power Versus Interest Grid



Sumber : Bryson (2004)

Keterangan :

- a. *Subjects* adalah *Stakeholders* dengan tingkat kepentingan yang tinggi tetapi memiliki pengaruh yang rendah
- b. *Key Players* adalah *Stakeholders* dengan kepentingan dan pengaruh yang tinggi
- c. *Context Setter* merupakan *Stakeholders* yang mempunyai pengaruh yang tinggi akan tetapi tingkat kepentingan yang rendah
- d. *Crowd* merupakan *Stakeholders* dengan sedikit kepentingan dan pengaruh terhadap hasil yang diharapkan

Menurut Viney (dalam Suwitri, 2011), *Stakeholders* dapat dimasukkan kedalam 4 kategori yaitu

1. Primer: *Stakeholders* yang memiliki pengaruh dan tingkat kepentingan yang tinggi untuk merekrut *Stakeholders* kategori ini dengan cara partner;
2. Sekunder: *Stakeholders* dengan pengaruh yang tinggi tetapi tingkat kepentingan yang rendah, untuk merekrut *Stakeholders* kategori ini dengan cara *consult*;
3. Tersier, yaitu *Stakeholders* dengan pengaruh yang rendah tetapi memiliki kepentingan yang tinggi, untuk merekrut *Stakeholders* kategori ini dengan cara *inform*;
4. Kwartir, yaitu *Stakeholders* dengan pengaruh dan kepentingan yang rendah, untuk merekrut *Stakeholders* kategori ini dengan cara kontrol.

Mengacu pada pendapat Moore (dalam Anggara, 2014: 187), *Stakeholders* yang terlibat dalam suatu kebijakan yaitu, *Stakeholders* state atau pemerintah, *Stakeholders* privat atau swasta, dan *Stakeholders* masyarakat (civil society). Sedangkan menurut Ahli, Cobb dan Elder (dalam Tri Yuniningsih, 2018:56-57) *Stakeholders* kebijakan yaitu pemerintah atau birokrasi, kelompok kepentingan, dan media massa.

Dalam jaringan *Stakeholders*, peneliti juga harus mengetahui peran –peran apa saja yang ada dari setiap *Stakeholders*, dimana menurut Nugroho (dalam Fitri & Hardi, 2017) : yang mengemukakan beberapa bentuk peran, yaitu

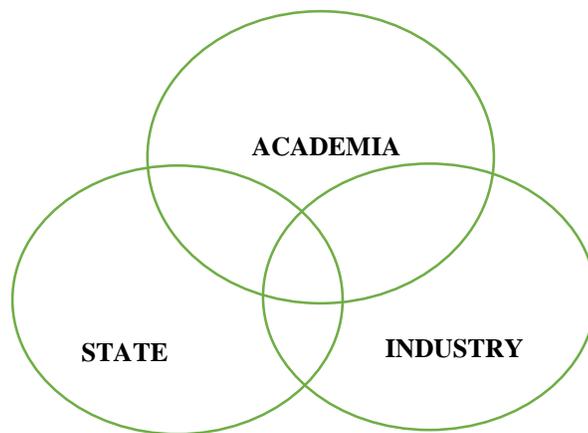
- a. *Policy creator* yaitu *stakeholders* yang mempunyai peran dalam pengambilan keputusan dan penentu suatu kebijakan
- b. Koordinator yaitu *stakeholders* yang berperan mengkoordinasikan *stakeholders* lain yang terlibat
- c. Fasilitator yakni *stakeholders yang berperan* sebagai fasilitator yang memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan kelompok sasaran
- d. Implementor yakni *stakeholders* pelaksana kebijakan yang didalamnya termasuk kelompok sasaran
- e. Akselarator yakni *stakeholders* yang berperan mempercepat dan memberikan kontribusi agar suatu program dapat berjalan sesuai sasaran atau bahkan lebih cepat waktu pencapaiannya.

Dari beberapa definisi dari konsep Jaringan *Stakeholders*, dapat disimpulkan Jaringan *Stakeholders* adalah suatu konsep yang menjelaskan hubungan saling mempengaruhi antar *Stakeholders* dalam suatu pembuatan dan pelaksanaan suatu kebijakan, hubungan ini dapat berupa hubungan antar organisasi dan institusi. Selain dari pada definisi, jaringan *Stakeholders* juga memiliki model , yaitu

1. Model Tripel Helix, model ini menjelaskan tentang hubungan antara pemerintah (*state*), *industry*, dan Akademisi dimana menurut model ini peran dari akademisi yaitu menjadi pusat dari aktivitas pengembangan berbasis riset, *industry* menjadi penyedia kebutuhan masyarakat berdasarkan aktivitas komersialnya dan *state* sebagai pembuat suatu kebijakan . Model Triple Helix menggambarkan pola

hubungan yang kompleks dan dinamis pada ketiga lembaga tersebut, hubungan ketiga lembaga tersebut membentuk infrastruktur pengetahuan berbentuk spiral yang saling overlapping :

Gambar 1.2 Model Triple Helix Kebijakan
Model Triple Helix Kebijakan



Sumber: Henry Etzkowitz and Loet Lydesdorff, 2000.

Kedua, Model Quadruple Helix , dimana Carayannis dan Campbell (2009) berpendapat tentang pentingnya peran pemerintah, akademisi , industry dan masyarakat sipil yang saling berhubungan satu sama lain. Secara paralel, konsep Quadruple Helix dikembangkan dengan mempertahankan interaksi dari lingkungan TH (UNI, IND, dan GOV) dan dengan meresmikan peran masyarakat sipil (misalnya, Yawson, 2009).

Ketiga, Model Quintuple Helix(Penta Helix) , dimana menurut Carayannis et al. (2012), *Stakeholders* tidak hanya terdiri dari universitas, industry, state dan masyarakat sipil, mencakup lingkungan alam dalam menentukan untuk pembangunan berkelanjutan" dan menyediakan "orang dengan 'modal alam' (misalnya: sumber daya,

tanaman, variasi hewan, dll.) ". Selain itu, model ini juga menjelaskan tentang apa arti pembangunan berkelanjutan dan berarti 'eco-innovation' dan 'eco-entrepreneurship' dalam situasi saat ini dan untuk masa depan kita".

1.6.7 Pengentasan Kemiskinan Nelayan

1.6.7.1 Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan adalah segala bentuk usaha dari *Stakeholders* pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat yang sebagai gambaran dari tujuan nasional bangsa Indonesia, dimana menurut Peraturan Daerah No 11 Tahun 2017 juga dibuat untuk menanggulangi kemiskinan. Implementasi dari kedua payung hukum tersebut diusahakan dari beberapa upaya berikut, yaitu :

1. Meminimalisir tanggungan kebutuhan sehari-hari agar warga miskin bisa mencukupi kebutuhan hidup bersama keluarganya, antara lain bantuan pangan non tunai, bea siswa miskin, angkutan BRT, pelayanan kesehatan dengan BPJS, UHC dan ambulance hebat di Kota Semarang ;
2. Penduduk miskin bisa mencukupi kebutuhan hidup layak dan memiliki akses dalam pelayanan dasar pelayanan dan peningkatan akses air bersih, mencegah BAB sembarangan, penanganan RTH dan peningkatan taman kota sebagai sarana rekreasi keluarga;
3. Memperbesar ruang akses pelayan public terhadap penduduk/ warga miskin seperti pelayan pendidikan, kesehatan, pelatihan skill, rumah belajar, perbaikan kampung tematik.

Implementasi program tersebut dapat berjalan apabila juga melibatkan *Stakeholders* lain khususnya dari sektor Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah juga sektor *private* (CSR),

1.6.7.2 Kemiskinan

Kemiskina menurut Suryawati (2005: 122) berpendapat bahwa kemiskinan merupakan kondisi adanya suatu ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan primer, seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum dan kondisi ini dihubungkan dengan kualitas hidup. Kemiskinan juga berarti tidak terdapatnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang layak untuk dapat mengatasi permasalahan kemiskinan serta memperoleh kehormatan yang layak sebagai masyarakat.

Menurut pendapat Frank Ellis dalam Suharto, (2005 : 133-135), kemiskinan dapat diklasifikasikan kedalam berbagai dimensi aspek , yaitu aspek ekonomi, sosial-psikologis dan politik. Apabila dilihat dari aspek ekonomi, kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan kurangnya sumberdaya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk memperoleh suatu kesejahteraan sekelompok orang. Sumberdaya yang dimaksud tidak hanya tentang permasalahan finansial dari individu tersebut, akan tetapi juga menyangkut semua aspek kekayaan (*wealth*) yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam definisi yang lebih luas.

1.6.7.3 Nelayan

Nelayan adalah orang yang hidup dari mata pencaharian hasil laut. Di Indonesia para nelayan biasanya bermukim di daerah pinggir pantai atau pesisir laut. Komunitas nelayan adalah kelompok orang yang bermata pencaharian hasil laut dan tinggal di desa-desa pantai atau pesisir (Sastrawidjaya 2002). Ciri komunitas nelayan dapat dilihat dari berbagai segi, sebagai berikut :

- a. “ Dari segi mata pencaharian, nelayan adalah mereka yang segala aktivitasnya berkaitan dengan lingkungan laut dan pesisir, atau mereka yang menjadikan perikanan sebagai mata pencaharian mereka. “
- b. “Dari segi cara hidup, komunitas nelayan adalah komunitas gotong royong. Kebutuhan gotong royong dan tolong menolong terasa sangat penting pada saat untuk mengatasi keadaan yang menuntut pengeluaran biaya besar dan pengerahan tenaga yang banyak, seperti saat berlayar, membangun rumah atau tanggul penahan gelombang di sekitar desa. “
- c. “Dari segi keterampilan, meskipun pekerjaan nelayan adalah pekerjaan berat namun pada umumnya mereka hanya memiliki keterampilan sederhana. Kebanyakan mereka bekerja sebagai nelayan adalah profesi yang di turunkan oleh orang tua, bukan yang dipelajari secara profesional. Dari bangunan struktur sosial, komunitas nelayan terdiri atas komunitas yang heterogen dan homogen. Masyarakat yang heterogen adalah mereka yang bermukim di desa-desa yang mudah dijangkau secara

transportasi darat, sedangkan komunitas yang homogen terdapat di desa-desa nelayan terpencil biasanya menggunakan alat-alat tangkap ikan yang sederhana, sehingga produktivitas kecil. Sementara itu kesulitan transportasi angkutan hasil ke pasar juga akan menjadi penyebab rendahnya harga hasil laut di daerah mereka.”

1.7 Operasionalisasi Konsep

Peran *Stakeholders* merupakan konsep yang menjelaskan suatu pemetaan peran dari *stakeholders* dari suatu kebijakan, dimana sebelum memetakan peran, terlebih dahulu akan mengidentifikasi siapa saja *stakeholders* yang terlibat di dalam suatu kebijakan, Mengacu pada pendapat Moore (dalam Anggara, 2014: 187), *Stakeholders* yang ada didalam suatu kebijakan publik, yaitu yaitu pemerintah sebagai *Stakeholders state*, swasta sebagai *Stakeholders private*, dan masyarakat sebagai *Stakeholders society*. Secara rinci, fenomena yang akan diteliti dalam penelitian tentang Peran *Stakeholders* Dalam Pengentasan Kemiskinan Kelompok Nelayan Kota Semarang Studi Kasus : Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara , Kota Semarang, yaitu :

1. Identifikasi *Stakeholders* yang terlibat Dalam Pengentasan Kemiskinan Kelompok Nelayan di Kelurahan Tanjung Mas , yang menurut pada pendapat Bryson (2004) , teknik pemetaan *Stakeholders* dapat dilakukan dengan teknik *Power Versus Interest Grid* yang fokus utamanya adalah *power* dan *interest*, dan mengacu pada pendapat Viney (dalam Suwitri, 2011), *Stakeholders* atau dapat dipilah ke dalam 4 kategori, yaitu :

- a. Stakeholder primer merupakan *stakeholders* yang memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi,
 - b. Stakeholder Sekunder merupakan *stakeholders* yang memiliki pengaruh yang tinggi, akan tetapi tingkat kepentingannya rendah
 - c. Stakeholder tersier merupakan stakeholder yang mempunyai pengaruh yang rendah akan tetapi tingkat kepentingannya tinggi,
 - d. Stakeholder Kwartir merupakan *stakeholders* yang pengaruh dan tingkat kepentingannya rendah,
2. Peran *Stakeholders/* yang terlibat adalah peran masing-masing *Stakeholders* yang terlibat dalam Peran *Stakeholders* Dalam Pengentasan Kemiskinan Kelompok Nelayan Kota Semarang Studi Kasus : Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang
- A. *Policy creator* merupakan *stakeholders* dengan peran vital dimana *stakeholders* ini bertugas untuk membuat suatu kebijakan
 - B. Koordinator merupakan *stakeholders* dengan peran mengkoordinir *stakeholders* lain tentunya dengan berkomunikasi satu sama lain ,
 - C. Fasilitator merupakan *stakeholders* yang menjalankan peran untuk memberikan fasilitas dan memenuhi kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran,
 - D. Implementor merupakan *stakeholders* yang berperan untuk melaksanakan suatu kebijakan, peran ini sering dihubungkan dengan kelompok sasaran dalam suatu kebijakan,
 - E. Akselerator merupakan *stakeholders* dengan peran membantu stakeholder lain supaya memperlancar proses pelaksanaan suatu program,

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Desain Penelitian

Pada dasarnya, metode penelitian adalah suatu cara dalam memperoleh informasi atau data dari suatu fenomena yang diteliti. Suatu penelitian pasti memiliki tujuan, dimana tujuan tersebut bisa untuk penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Metode penelitian juga mempunyai jenis yang berbeda-beda, Gay (1977) menyatakan bahwa sebenarnya sulit untuk membedakan antara penelitian murni (dasar) dan terapan secara terpisah , karena keduanya terletak pada garis kontinum.

Sedangkan menurut Jujun S. Suriasumantri (1985) yang berpendapat bahwa suatu penelitian dasar atau murni merupakan penelitian yang mempunyai tujuan mencari pengetahuan baru yang tidak pernah diketahui sebelumnya dan penelitian terapan merupakan penelitian yang mempunyai tujuan untuk menyelesaikan permasalahan kehidupan praktis.

Metode Penelitian juga bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu metode penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif, dimana metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini juga disebut sebagai metode artistic, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpolo), dan disebut sebagai metode interpretative karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan, Sedangkan Metode kuantitatif disebut sebagai

metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivism. Metode ini disebut sebagai metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan menggunakan statistik.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan “paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif”. Penelitian kualitatif pada hakikatnya mengamati orang dan objek yang ada pada lingkungan hidup, melakukan interaksi dengan objek penelitian, dan berupaya masuk dalam kebudayaan dan memahami bahasa dari objek suatu penelitian “(Nasution, 1988:5).”

Penelitian sosial dikelompokkan menjadi dua, yakni penelitian deskriptif dan penelitian eksplanasi. Dimana, penelitian ini akan menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang bertujuan untuk mengklarifikasi dan melihat lebih dalam lagi terkait permasalahan peran *stakeholder* dalam pengentasan kemiskinan kelompok nelayan di Kelurahan Tanjung Mas dengan cara menceritakan atau mendeskripsikan sejumlah variabel dengan masalah yang diteliti yakni pengentasan kemiskinan nelayan.

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Kota Semarang yang beralamat di Jalan Pemuda No.143 Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, dimana dinas ini merupakan instansi pemerintah yang menangani permasalahan kemiskinan secara teknis, selain melakukan penelitian di instansi pemerintah, peneliti juga akan

melakukan penelitian di wilayah Kel. Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, dimana wilayah ini merupakan salah satu wilayah dengan angka kemiskinan tertinggi apabila dibandingkan dengan angka kemiskinan wilayah kelurahan lain di Kecamatan Semarang, ini juga merupakan salah satu alasan kuat dari peneliti untuk memilih wilayah ini menjadi lokasi penelitian.

1.8.3 Subjek Penelitian

1.8.3.1 Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau sering juga disebut responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian. Pemilihan informan penelitian menggunakan teknik *purposive* yang artinya pengambilan data dengan cara langung menentukan narasumber untuk mendapatkan jawaban dan informasi dari narasumber yang tentunya mengetahui dengan pasti mengenai permasalahan terkait dengan penelitian. Agar data yang diperoleh benar dan sah maka peneliti mengadakan *triangulasi* data dengan melakukan pengecekan objek yang diteliti kepada subjek yang berbeda dengan laporan atau dokumen yang relevan (Moloeng, 2007 : 287).

Informan yang dipilih oleh peneliti untuk melengkapi data penelitian ini adalah pegawai yang ada pada Dinas Sosial Kota Semarang , Pegawai Kecamatan Semarang Utara, Pegawai Kelurahan Tanjung Mas, Ketua RT 01/ RW 15 Tambak Lorok, Ketua

KUB(Kelompok Usaha Bersama) Tambak lorok, Sekretaris KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia) serta beberapa masyarakat nelayan di wilayah Tambak Lorok,

1.8.3.2 Teknik Pemilihan Subjek Penelitian

Dalam melakukan pemilihan subjek penelitian, terdapat dua teknik pemilihan, yaitu *probability sampling* dan *nonprobability sampling*. Pada teknik *probability* dijelaskan bahwa teknik ini memberikan kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel dari setiap anggota (populasi). Teknik *nonprobability* adalah sebaliknya dimana tidak memberikan peluang yang serupa kepada semua unsur populasi untuk menjadi sampel di dalam penelitian. Teknik sampling ini mencakup “ sistematis, *purposive*, aksidental, kuota, dan *snowball*, ”

Teknik yang sering dilakukan di dalam penelitian kualitatif adalah teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan kriteria tertentu , artinya apakah sampel tersebut dirasa bisa menjawab dan mengetahui fenomena apa yang sedang kita teliti, sedangkan teknik *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang bersifat dinamis, artinya sampel dapat bertambah ataupun berkurang tergantung dengan fenomena yang didapat pada saat melakukan penelitian

1.8.4 Jenis Data

Pada penelitian ini, data yang digunakan yaitu data kualitatif, dimana Lofland dan Lofland (2009:157) menjelaskan tentang sumber dari data kualitatif

yaitu kata-kata, dokumen, dan informasi lainnya . Berhubungan juga dengan hal tersebut jenis data dibagi menjadi kata-kata, tindakan, sumber data tertulis, foto dan lain sebagainya. Data-data yang menggambarkan dan merepresentasikan permasalahan kemiskinan dalam penelitian ini dapat ditemui pada portal online di beberapa instansi, seperti SIMGAKIN Bappeda Kota Semarang, Badan Pusat Statistik Kota Semarang dan , Dinas Sosial Kota Semarang yang memberikan data atau informasi secara terbuka kepada masyarakat, selain itu juga dapat ditemui dalam buku, berita dan informasi dan juga jurnal.

1.8.5 Sumber Data

Dalam melakukan penelitian, peneliti harus memiliki sumber data yang konkret agar data-data dan informasi yang diberikan benar adanya dan sah. Menurut pendapat Lofland dan Lofland (1984:47) sumber utama data didalam penelitian terkhususnya penelitian kualitatif bersumber dari kata-kata dan juga tindakan, selebihnya diambil dari data tambahan yang dimiliki oleh peneliti seperti dokumen ataupun foto. Berkaitan dengan hal ini sumber data dibagi kedalam data tertulis, foto dan juga statistik. Secara teori, sumber data terdiri atas dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

“ Sumber data primer adalah data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2013:137). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Dinas Sosial Kota Semarang, Bappeda Kota Semarang dan Kelurahan

Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang. Data primer yang diperoleh melalui hasil pengamatan langsung kelapangan tentang situasi dan kondisi.”

b. Sumber data sekunder

“ Sumber Data Sekunder yaitu data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya yang dapat berupa hasil pengolahan lebih lanjut dari data primer yang disajikan dalam bentuk lain atau dari orang lain (Sugiyono, 2013:137). Data sekunder dalam penelitian ini didapat dari beberapa buku, jurnal, berita dan informasi dari internet.”

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian Kualitatif biasanya bersifat alamiah, maksudnya fenomena yang diteliti adalah sesuai dengan kondisi natural tanpa adanya manipulasi data, dimana beberapa teknik yang sering dilakukan dalam penelitian kualitatif, yaitu :

1. Observasi

“ Nasution (1988) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi sedangkan Sanafiah Faisal (1990) mengklasifikasikan observasi menjadi observasi berpartisipasi , observasi yang secara terang-terangan dan tersamar dan observasi yang tak berstruktur.”

a. Observasi partisipatif

“ Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau digunakan sebagai sumber data penelitian. Susan Stainback (1988)

menyatakan dalam observasi partisipatif, peneliti mengamati apa yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan berpartisipasi dalam aktivitas mereka.”

b. Observasi terus terang atau tersamar

“ Dalam hal ini, peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi , hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan.”

c. Observasi tak berstruktur

“ Observasi tak berstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan peneliti tidak menggunakan instrument yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan.”

“ Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi Observasi terus terang atau tersamar , dimana peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian.”

2. Wawancara / Interview

“ Esterberg (2002) mendefinisikan interview adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu, selain itu dia juga berpendapat bahwa interview merupakan hatinya penelitian sosial. Bila anda lihat jurnal dalam ilmu sosial, maka akan anda temui semua penelitian sosial didasarkan pada interview, baik yang standar maupun yang dalam. Sedangkan Susan Stainback (1988) mengemukakan bahwa dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.”

Wawancara yang dilakukan terhadap informan menggunakan daftar pedoman wawancara atau interview guide yang berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan fenomena penelitian yang akan diteliti. Pedoman wawancara terstruktur dengan baik dalam hal peran *stakeholder* dalam pengentasan kemiskinan kelompok nelayan di Kelurahan Tanjung Mas.

Esterberg (2002), mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu :

- a. “ Wawancara terstruktur (*structured interview*) adalah Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian

berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternative jawabannya pun telah disiapkan”

b. Wawancara Semi terstruktur (*Semistructured Interview*)

“ Tujuan dari wawancara Semi terstruktur adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat , dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.”

c. Wawancara tak berstruktur (*Unstructured interview*)

“ Wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.”

Penelitian ini melakukan pengumpulan data dengan wawancara tidak terstruktur (terbuka) dengan tujuan peneliti dapat menggali informasi lebih mendalam yang dilakukan dengan semua sumber penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ringkasan kejadian yang telah terjadi, dimana biasanya berbentuk tulisan, gambar-gambar dan karya monumental. Dokumentasi mempunyai fungsi sebagai data pelengkap didalam penelitian sosial. Namun, dokumentasi mempunyai kelemahan yaitu apabila ada data yang belum lengkap, akan sulit untuk melakukan dokumentasi yang sama pada fenomena tertentu.

1.8.7 Teknik Analisis dan Interpretasi Data

1.8.7.1 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, ada beberapa teknik analisis data yang sering digunakan dalam penelitian. model Miles and Huberman dalam Sugiyono (2015:246) mengemukakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung Pada penelitian ini, peneliti menggunakan gabungan dari beberapa teknik analisis data yakni teknis analisis domain, teknik analisis taksonomik dan teknik analisis komponensial.

Dimana dalam teknik analisis domain terdapat hubungan yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan-permasalahan yang ditemukan peneliti. (Spradley dalam Sugiyono, 2014: 101) : mengatakan bahwa ada 9 hubungan semantik dalam analisis domain yakni jenis, ruang, sebab akibat, alasan, lokasi kegiatan, cara untuk mencapai tujuan, fungsi, urutan tahapan, serta atribut. Hubungan teknik analisis domain dengan penelitian ini adalah untuk menjelaskan sebab akibat, alasan, lokasi kegiatan dan urutan tahapan strategi yang dilakukan dalam pengentasan kemiskinan kelompok nelayan di Kelurahan Tanjung Mas.

1.8.7.2 Interpretasi Data

Interpretasi data adalah usaha memahami lebih mendalam hasil penelitian yang telah ditemukan. (Sugiyono, 2014:151). Cara yang dapat dilakukan untuk memahami hasil penelitian adalah meninjau secara teliti dan kritis dengan menggunakan teori yang berhubungan dengan data yang didapat dari lapangan.

1.8.8 Kualitas Data

Kualitas data diperlukan agar informasi atau data yang didapat sah dan sesuai dengan fakta. Cara yang digunakan agar data yang didapatkan dapat dipertanggungjawabkan adalah melalui triangulasi yakni memeriksa data yang dilakukan dari beberapa sumber data yakni dari wawancara, observasi serta dokumentasi. Susan stainback (1988) menjelaskan jika hasil yang diinginkan dengan menggunakan triangulasi adalah untuk meningkatkan pemahaman peneliti pada data atau informasi yang dicari dan tidak hanya melihat kebenaran dari suatu fenomena.

Terkadang , informan tidak bisa memahami kondisi sekitarnya dengan baik dan tidak dapat dihubungkan dengan teori dan fakta hukum. Selanjutnya Mathinson (1988) menjelaskan tentang nilai yang dihasilkan dari teknik pengambilan data triangulasi tujuannya agar memperoleh data *convergent* melihat nilai inkonsisten, dan kontradiksi. Oleh sebab itu, teknik triangulasi ini akan bisa mendapatkan data yang lebih konsisten dan pasti. Senada dengan hal tersebut , Ahli Patton (1980) menyebutkan bahwa teknik dengan triangulasi akan menambah kearutan dan kekuatan data, apabila disandingkan dengan pengumpulan data satu metode pendekatan.